

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andreae, Fockema, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Anwary S., *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia Edisi III*, Institute of Socio-Economics and Political Studies "People Message" (AMRA) Jakarta, 2005.

Atmasasmita, Romli, *Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi ke dalam Sistem Hukum Nasional*, Proposal, Departemen Kehakiman dan Ham RI badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.

Chaikin, David, *Pendeteksian transfer hasil tindak pidana, termasuk korupsi*, diatur dalam pasal 52 KAK 2003.

Conyngham, John, Esq., *Recovering Dictator's Plunder*, *Global Director Investigation*, 9 Mei 2002.

Daniel, Tim, *Registration of looted state assets: Selected case studies and the UN Convention against Corruption*, Transparency International, Bab 5, 2001.

Fleming, Matthew H., *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior*, *An Economic Taxonomy*, Draft for comments, version date, 27 Januari 2005, University College London.

Friedman, Lawrence M., *Law in America: A Short History*, *Modern Library Chronicles Book*, New York, 2007.

Friedman W., *Law in Changing Society*, *Stevens & Sons Limited*, London, 1959.

Garner, Bryan A., *Blacks Law Dictionary, seventh Edition*, Texas, June 1999.

Gillespie, James, *Follow The Money: Terrorist Assets*.

Haikkenen, Kaisa, *Law and Economic Analysis of Confiscating the Proceeds of a Crime*, Lappeeranta, Finland.

Halim, A. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Halim, A. Ridwan, *Hukum administrasi Negara dalam Tanya Jawab*, Balai Aksara dan Yudhistira dan Saadiyah, 1987.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Junaedi A.M., *Kamus Politik Populer*, Madani, Jakarta, 2002.

Levi, Michael, *Tracking and Recovering the Proceeds of Crime*, Cardiff University Wales, UK, Tbilisi, Georgia 2004.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Nye, Joseph S., *Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis*, dalam *American Political Science Review* 51, 1967.

Paku Utama, *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Implementasinya di Indonesia*, 2008.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Prenzler, Tim & Ransley, Janet, *Police Reform*, Annandale: Hawkins Press, 2002.

Prinst, Darwin, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Prinst, Darwin, *Strategi menyusun dan menangani Gugatan Perdata*, cet. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Purbapranoto, Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Angkasa Offset Bandung: 1981.

Rawls, John, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, 1999.

Schelling, Thomas C., *Command and Control*, tulisan pada buku *Social Responsibility and the Business Pericament*, James W. McKie (editor), The Brookings Institution, Washington, 1974.

Schoeder, William R., *A Review Article: How To Do Financial Asset Investigation: A Practical Guide for Private Investigators, Collections Personnel and Assets Recovery Specialists*, The FBI Law Enforcement Bulletin, Juli 2001.

Soebekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, cet. 11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI Press, Jakarta, 1986.

Sutanto, Retnowulan dan Oeripkatawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2002.

Summers, Robert S., *Form and Function in a Legal Sistem*, Cambridge University Press.

Sumodiningrat, Gunawan, *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi*, PerPod, 2001.

Swartz, Omar, *Human Nature Revie; The Rule of Law; Corruption and Mutual Legal Assistance*, Boston, OCVA, 2006.

Swartz, Omar, *On Social Justice and Political Struggle*, Essay, Human Nature Review, Vol. 4, 12 Agustus 2004.

Torres, Fransisco Ramirez, *Los Delitos economicos en los Negocios*, kutipan dalam buku Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Yanuar, Purwaning M., *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Cet. Ke-1. Bandung PT. Alumni, 2007.

B. Artikel

FATF, *Evaluation of Laws and Systems in FATF Members Dialing wih Assets Confiscation and Provisional Measures*, 1997.

Jurnal Transparansi Edisi 17/Feb 2000, Indonesia dan Budaya Korupsi: *Penanganan masalah korupsi telah diatur dalam UU No. 3 tahun 1971. Kebijakan Pemerintah pun sudah jelas. Bagaimana Praktiknya?*

Menurut Selo Sumardjan, sekitar tahun 50-an, seorang pendidik dalam suatu seminar di Jogjakarta, telah menyatakan bahwa “Korupsi sudah menjadi budaya” di Indonesia. Kalimat ini kemudian sangat sering dikutip dan di pakai luas, untuk menggambarkan situasi kondisi korupsi di Indonesia yang sudah demikian sulit diatasi.

Omar Swartz, *On Social Justice and Political Struggle*, Essay, Human Nature Review, Vol. 4, 12 Agustus 2004.

C. Perundang-undangan

Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 LN No.xxx Tahun1981, TLN No. 3201.

Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata *Staatsblad* 1941 No. 44 di perbaharui *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. UU No.30 LN No. 137 Tahun 2002 TLN No. 4431.

Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 3 LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958.

Indonesia (a), *Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, LN tahun 2004 No. 67, TLN No.4401, Ps. 1 ayat 1.

Diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971, Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958.

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3974.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Undang-undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28, LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851.

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 1, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian. UU No. 43, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

Undang-undang tentang Keuangan Negara. UU No. 17, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.

Indonesia mengundangkan UU No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengatur tentang nikah, talak dan rujuk. Syariat Islam diberlakukan di Propinsi NAD.

Dinyatakan berlaku berdasarkan UU Darurat No. 1 tahun 1951.

Perma No. 1 tahun 2005 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Indonesia (b), Undang-undang tentang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003, LN. tahun 2003 No. 49, TLN No. 4282, Ps. 1 ayat 1 butir (1).

Pasal 209 dan 210 (penyuapan) berada pada Bab VIII: Kejahatan terhadap kekuasaan Pemerintah. Pasal 387 (penipuan), Pasal 417, 418, 419, 420, 423, dan

435 berada pada Bab XXVIII. Kejahatan yang dilakukan dalam Jabatan, yang mengikat pegawai negeri dan angkatan bersenjata.

D. Internet

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. “Korupsi”. <id.wikipedia.org/wiki/Korupsi-46k> diakses 17 September 2009.

Shehu, Abdullahi, “*Minutes of Workshop 4.4-Mutula Legal Assistance*”, (<http://www.11acc.Org/>).

Suhadibroto “Sulit menggugat koruptor secara perdata” .Mediacare <mediacare.blogspot.com/2005/02/Suhadibroto-sulit-menggugat-koruptor.html-291k->diakses 7 Oktober 2009.

E. Koran

Kompas, 11 Maret 2003, Memberantas Budaya Korupsi Lewat Pendidikan?, hlm. 4-5.

